

## Analisis Implementasi Kebijakan UKT di UGM Tahun 2013-2015

### Abstraksi

Kajian ini menganalisis implementasi kebijakan UKT di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013-2015. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Dikti berdasarkan amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. UKT diharapkan Dikti mampu menjadi sistem biaya kuliah yang lebih mudah, terjangkau, dan berkeadilan. Namun implementasi kebijakan UKT sejak tahun 2013 masih menyisakan banyak persoalan. Kajian ini berusaha menjelaskan bagaimana proses implementasi kebijakan UKT di UGM tahun 2013-2015. Selain itu kajian ini juga akan melihat dampak kebijakan UKT terhadap pemenuhan hak publik atas pendidikan tinggi

Analisis implementasi kebijakan UKT ini akan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle yaitu analisis konten dan konteks kebijakan. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara, FGD dan arsip.

Pada dimensi konten kebijakan, ditemukan bahwa UKT tidak sensitif pada situasi dan kepentingan UGM. UKT menghendaki hilangnya uang pangkal yang menjadi sokongan besar keuangan UGM. Hal ini mendorong UGM menjalan kebijakan dengan strategi inkremental. Hal ini diperparah dengan persoalan lemahnya pemahaman pelaksana kebijakan, model kebijakan yang *top-down*, dan hambatan aliran dana BOPTN terutama pada tahun 2013. Kajian ini juga menunjukkan implementasi UKT hadir pada rezim otonomi dan liberalisasi pendidikan tinggi. Sayangnya otonomisasi tersebut tidak diikuti dengan pelembagaan kebijakan yang memadai. Ditemukan pula beberapa kasus aktor-aktor yang terlibat tidak mematuhi beberapa ketentuan dan esensi kebijakan UKT.

Kajian ini menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan UKT di UGM tahun 2013-2015 masih diwarnai banyak permasalahan. Hal tersebut kemudian berdampak pada kerugian mahasiswa yang harus membayar biaya kuliah jauh lebih mahal dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Implementasi kebijakan UKT di UGM masih penuh diwarnai tarik menarik dan konflik yang tidak juga menemui konsensus. Hal ini membuat implementasi UKT semakin kabur dari esensi kebijakan itu sendiri.

**Keyword:** Pendidikan Tinggi, UGM, Uang Kuliah Tunggal (UKT), Implementasi Kebijakan.

## Analysis of Single Tuition Fee Policy Implementation in UGM 2013-2015

### Abstract

This thesis will analyze the implementation of Single Tuition Fee policy in UGM 2013 – 2015. The Single Tuition Fee (UKT) is a policy issued by Ministry of Research, Technology, and High Education (DIKTI) based on High Education Legislation Number 12 in 2012. This policy is expected to be easier, attainable, and fairer than the prior tuition fee system. However, since coming into effect in 2013, the policy still leaves many problems. Thus, this thesis tries to explain how the UKT policy implementation in UGM, particularly in 2013 – 2015 and to analyze its implications concerning the rights of access to high education.

This thesis will apply Grindle's Theory of Policy Implementation as analytical tool, particularly on content analysis and policy context. This thesis is qualitative-based research and use the study case method.

In the policy context dimension, UKT policy was found unsuitable for UGM's condition and interests. The policy required the removal of initial payment which give big contribution to UGM finance. This made UGM carried the policy with incremental strategy. Moreover this was worsened by the implementer's lack of comprehension regarding the policy, the top-down policy model and the obstruction of BOPTN fund particularly in 2013. This thesis will also show the implementation of UKT policy occurred in autonomous regime and the liberalization of high education. Unfortunately, the autonomous regime was not followed by sufficient policy institutionalization. Further discovery found that in several cases, the actors did not comply on the provisions and the essence of UKT policy.

This thesis concludes that the UKT policy implementation in UGM in 2013 – 2015 still has many problems and obstacles. This has adverse impacts to the students as they are required to pay a higher amount of tuition fee than in the prior system. The implementation of this policy is still contested which leads to difficulty in reaching consensus. This makes the UKT policy implementation blurrier from its essence.